**PERUBAHAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT**

**Aidil Susandi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Jln. William Iskandar Psr. V, Medan Estate 20371

e-mail:aidilsusandi2019@yahoo.com

**Abstrak**

*Hukum Islam adalah hukum yang diperuntukkan untuk semua manusia dalam setiap masa dan tempatnya. Ia tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis maupun zaman. Keyakinan ini di dasari oleh karakteristik hukum Islam yang universal, sempurna, kekal dan dinamis. Setiap aspek kehidupan manusia tidak luput dari sorotan Islam. Alquran dan Sunnah memang telah final turun dan tidak ada penambahan, namun kandungan dan jiwa kedua sumber tersebut selalu hidup dalam denyut kehidupan masyarakat. Ia merespon setiap perkembangan, memberi jawaban dan solusi bagi manusia. Dan tulisan ini memaparkan bagaimana hukum Islam merespon perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dalam mengelaborasi karakteristik dan tujuan syariat Islam (maqhasid syariah), sehingga didapatkan bahwa perubahan hukum dapat disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat serta faktor-faktor lainnya. Data-data dikumpulkan menggunakan penelitian pustaka (library research).*

***Abstract:***

*Islamic law is a law that is intended for all human beings in every time and place. It is not limited by geographic barriers or times. This belief is based on the characteristics of Islamic law that are universal, perfect, eternal and dynamic. Every aspect of human life does not escape the spotlight of Islam. The Koran and Sunnah have indeed been finalized and there are no additions, but the content and soul of these two sources are always alive in the pulse of people's lives. It responds to every development, provides answers and solutions for humans. And this paper describes how Islamic law responds to developments and changes that occur in society. This research uses descriptive analysis in elaborating the characteristics and objectives of Islamic law (maqhasid syariah), so that it is found that changes in law can be caused by changes in time and place as well as other factors. The data were collected using library research.*

**Kata Kunci**: *Faktor Perubahan Hukum Islam, Pembaharuan hukum, Perkembangan*

**Pendahuluan**

Islam adalah agama yang memiliki konsep hukum yang komplit. Semua tindakan manusia mendapat perhatian oleh Islam. Ini dimaksudkan agar setiap tindakan dan prilaku manusia sesuai dengan tujuan diiturunkannya agama ini. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sepele sampai masalah besar dan dunia. Dari hal-hal yang bersifat privat sampai masalah sosial.

Sumber hukum Islam -Alquran dan sunnah- telah final diturunkan dan tidak akan ada penambahan sedikitpun. Kedua sumber itu diturunkan empat belas abad yang lalu dalam masyarakat dan kebudayaan Arab. Namun Islam bukan diperuntukkan untuk suatu bangsa dan masa tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa di dunia yang memiliki kebudayaan yang berbeda dan untuk sepanjang masa. Dan masyarakat itu sendiri terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam seluruh aspeknya, baik ekonomi, sosial, politik, militer, budaya, dan sebagainya.

Pada dasarnya kajian tentang perubahan hukum Islam bukanlah suatu yang baru. Namun tetap senantiasa menjadi tema yang hangat dikalangan ahli hukum. Hal ini tak lain bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan kehidupan yang terus berkembang terlebih di era teknologi informasi yang berkembang cukup pesat. Oleh karena itu, penambahan dan elaboratif dari kajian-kajian perubahan dan pembaharuan hukum masih layak untuk dikaji. Terlebih aspek-aspek sosiologis pembentuk hukum masih berserakan dalam literatur-literatur fikih dalam rentang cukup lama.

Kajian ini menggunakan data-data yang diperoleh melalui kepustakaan (library search). Dan selanjutnya data di analisis dengan analisis isi (*content analysis*) dengan pelaporan bersifat deskriptif. Kajian ini berusaha mensistematiskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hukum Islam.

**Tujuan hukum Islam (*maqashid as-Syari’ah*)**

Selaku pembuat undang-undang (*al-Ḥâkim*), Allah tidak menurunkan keputusan untuk kesia-siaan maupun membebani makhluknya. Kesemua aturan dan jalan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk kebaikan dan menjaga sistem sosial manusia dan alam. Kebaikan itu bisa berupa kebaikan akal, ruh, perbuatan dan lain sebagainya. Dan syariat Islam diturunkan bukan sekedar untuk persoalan akidah semata. Bila dilihat dari keseluruhan ayat-ayat Alquran maka didapati bahwa tujuan syariat adalah untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakkan (*jalb al-maṣâliḥ wa dar’ al-mafâsid*).[[1]](#footnote-1)Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.[[2]](#footnote-2)

*Maṣlaḥah* adalah menolak kerusakan atau mengambil suatu manfaat. Dari segi tingkatannya, *maṣlaḥah* terbagi kepada *al-dharûriyât* (primer), *al-ḥâjiyât* (sekunder) dan *al-taḥsiniyât* (tersier). *Al-dharûriyât* merupakan *mashlahah* pokok bagi setiap hamba, sementara *al-ḥâjiyât* dan *al-taḥsiniyât* adalah pelengkap.

Para ulama ushul fikihsepakat bahwa ada lima yang menjadi masalah pokok (*dharûriyât*) dalam kehidupan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa tujuan syariat adalah: *ḥifz al-dîn, ḥifz al-nafs, ḥifz al-nasl, ḥifz al-‘aql dan ḥifz al-mâl*[[3]](#footnote-3)*.*

Untuk menjaga kelima hal pokok ini, syariat Islam membuat hukum-hukum di setiap masing-masingnya seperti memerangi orang yang murtad (*ḥifz al-dîn*), memberlakukan *qiṣâṣ* (*ḥifz al-nafs*), *had* zina (*hifz an-nasl*), *ḥad* peminum khamar (*ḥifz al-‘aql*) dan potong tangan bagi pencuri (*ḥifz al-mâl*).Dan segala hal yang berhubungan dengan penjagaan kelima *dharûriyât* itu. Dan di sisi lain bahwa syariat juga melakukan pembinaan-pembinaan keimanan dan spiritual.[[4]](#footnote-4) Sehingga proses penjagaan kelima hal pokok dalam kehidupan manusia itu berlangsung dengan kesadaran dalam setiap individu. Karena untuk menjaga sesuatu tidak cukup melalui hukuman semata, namun perlu ada pembinaan kesadaran.

Tingkatan-tingkatan maslahat tersebut tidak selamanya statis. Dari waktu ke waktu dapat saja kebutuhan sekunder menjadi primer dan kebutuhan tersier menjadi sekunder. Karena kebutuhan manusia tentu bisa meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, hukum juga dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan manusia.

Sebagai pencipta, Allah mengetahui setiap kebutuhan, keperluan dan perkembangan manusia. Apa yang diperintahkanNya bertujuan untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Dan apa yang dilarang maka itu mengandung keburukan.[[5]](#footnote-5)

**Karakteristik Syariat Islam**

Sebagai hukum yang menjadi acuan kehidupan, hukum Islam memiliki karakteristik-karakteristik yang menyebabkannya layak menjadi hukum yang lintas generasi dan dimensi. Diantara karakteristik hukum Islam adalah:

1. Universal (*syumûl*)

Syariat Islam diperuntukkan bukan untuk satu bangsa tertentu, melainkan untuk setiap bangsa yang ada di dunia. Alquran menyebutkan:

“*Tidaklah Kami mengutus engkau kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam*”[[6]](#footnote-6).

Syariat Islam cocok dan tepat untuk setiap kondisi bangsa dimanapun berada. Ia tidak terikat oleh satu kultur dan budaya tertentu dan tidak pula dikerangkeng oleh pandangan-pandangan lokal yang terbatas. Nilai-nilai yang dibawanya membawa kebaikan untuk siapa saja tanpa ada perbedaan sedikitpun, baik yang berkulit putih, hitam, kuning, maupun coklat. Baik yang bertubuh tinggi dan kekar maupun berbadan pendek dan kurus.

Dengan wataknya yang universal, Islam menempatkan manusia sama di mata hukum. Tidak ada pemilahan antara suatu bangsa dan bangsa yang lain.

1. Sempurna (*kâm*î*l*)

Allah berfirman:

“*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku ridhai Islam menjadi agamamu*”[[7]](#footnote-7)

Dalam tafsirnya, Thabari dan Qurthubi menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah telah sempurnanya persoalan-persoalan ibadah dan hukum-hukum.[[8]](#footnote-8) Kesempurnaan hukum-hukum Islam itu berarti tidak ada satupun permasalahan yang luput dari perhatian Islam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sumber yang terbatas -Alquran dan sunnah- dapat menampung persoalan zaman yang tidak terbatas itu?

Perlu dijelaskan, bahwa kesempurnaan hukum bukan hanya dilihat dari apakah hukum itu sudah diputuskan sebelumnya oleh Alquran dan Sunnah atau belum. Namun bahwa prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah telah memberi wadah untuk merespon setiap persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Islam memadukan antara akal dan batin, dunia dan akhirat, hak dan kewajiban, keluhuran fitrah dan realitas. Sifat tawâzun Islam ini memberikan manusia kepada kehidupan yang seimbang dalam menjalani kehidupan yang semakin hari semakin kompleks.[[9]](#footnote-9)

1. Kekal

Syariat Islam adalah syariat penyempurna dan penutup bagi syariat-syariat nabi sebelumnya. Ia mengandung unsur-unsur keabadian sehingga senantiasa diperuntukkah untuk sepanjang waktu.[[10]](#footnote-10) Sifat keabadian ini memungkinkan hukum Islam bergerak secara dinamis.

1. Elastis

Elastis bukan berarti hukum Islam dapat ditarik kemana-mana sekehendak hati, namun putusan hukum dapat berubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya seperti menyimpan daging kurban dimana awalnya Rasulullah melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Namun pada tahun berikutnya Rasulullah membolehkannya. Dan dalam sejarah hukum Islam, contoh-contoh perubahan hukum seperti ini banyak ditemukan.

Keelastisan hukum Islam ini bertujuan untuk memberikan kemashlahatan terhadap manusia sendiri. Karena hukum diturunkan bukan untuk menyulitkan dan menyusahkan, melainkan sebagai solusi yang dihadapi masyarakat.

**Respon Hukum Islam terhadap Perkembangan Masyarakat**

Selain Akal, Allah juga menganugerahi manusia keinginan bebas yang diliputi oleh kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat buruk. Adanya keinginan bebas tersebut menjadikan kehidupan manusia berdinamika. Ia bukan malaikat yang mutlak mengabdi tanpa cacat dan bukan pula hewan yang bertindak dengan insting semata.

Sejarah adalah saksi nyata bahwa manusia itu berkembang. Tiap kurunnya terlihat jelas adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan dan perkembangan itu tampak baik dibidang sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, tradisi, budaya, maupun gaya hidup. Terdapat perbedaan antara tradisi di abad 19 dan abad 20. Perbedaan itu akan semakin mencolok bila rentang kurunnya semakin jauh. Perkembangan adalah sunah kehidupan. Alquran sendiri menegaskan adanya perubahan dan perkembangan tersebut, yang dapat dilihat dari kisah-kisah Alquran.

Perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan sendirinya membutuhkan hukum-hukum tersendiri, sehingga fungsi hukum untuk mencapai kebaikan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan relevan dengan kondisi yang dihadapi.

Namun perlu juga diingat -sebagaimana wataknya manusia- perkembangan juga berpotensi ke arah yang baik sekaligus buruk. Jadi tidak semua perkembangan membawa dampak positif bagi umat manusia. Dengan demikian, hukum juga harus dapat menghentikan laju perkembangan yang negatif, selain tentunya memproduksi hukum yang dapat menggerakkan perkembangan positif.

Seperti yang sudah dikemukakan, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mecegah kerusakkan. Hukum Islam di proyeksikan untuk kemajuan dan kepentingan manusia dan mencegah setiap tindakan yang membawa pada kerusakan dalam setiap lininya. Baik itu moral, sosial, ekonomi, politik, militer, seni, budaya dan sebagainya.

Dengan demikian, hukum Islam harus dapat menangkap pesan-pesan zamannya sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik. Dan ini memungkinkan adanya perubahan hukum dari satu hukum ke hukum yang lain. Namun penting untuk di kemukakan bahwa perubahan hukum memiliki mekanismenya sendiri dan dalam bingkai prinsip-prinsip yang dikandung Alquran dan Sunnah. Perubahan bukan berarti tercerabut dari akar-akarnya melainkan pembaharuan (*tajdîd*) yang menyerap prinsip-prinsip *maqâṣid* syariat dalam realitas kekinian.

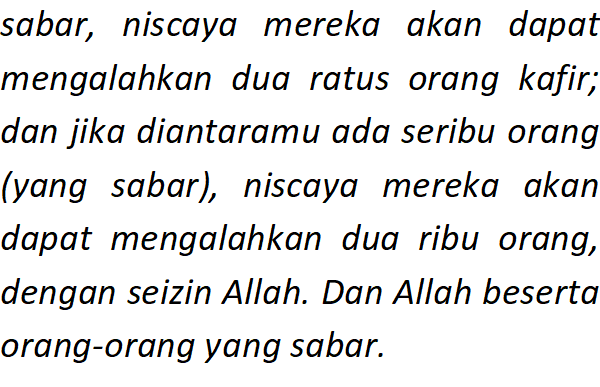
Dalam hukum Islam, ada hukum-hukum yang bersifat *tsawabit* (tetap) dan adapula bersifat *mutaghayyirât* (membutuhkan perubahan). Perubahan hukum Islam hanya dimungkin untuk hal-hal yang masuk dalam ranah hukum *zanni* yang menerima perbedaan serta perubahan. Sedangkan untuk persoalan-persoalan yang pasti (*qat’i*) dan *muhkamât,* hukum Islam tidak membutuhkan perubahan hukum. [[11]](#footnote-11) Dan hal-hal semacam itu tidaklah banyak.

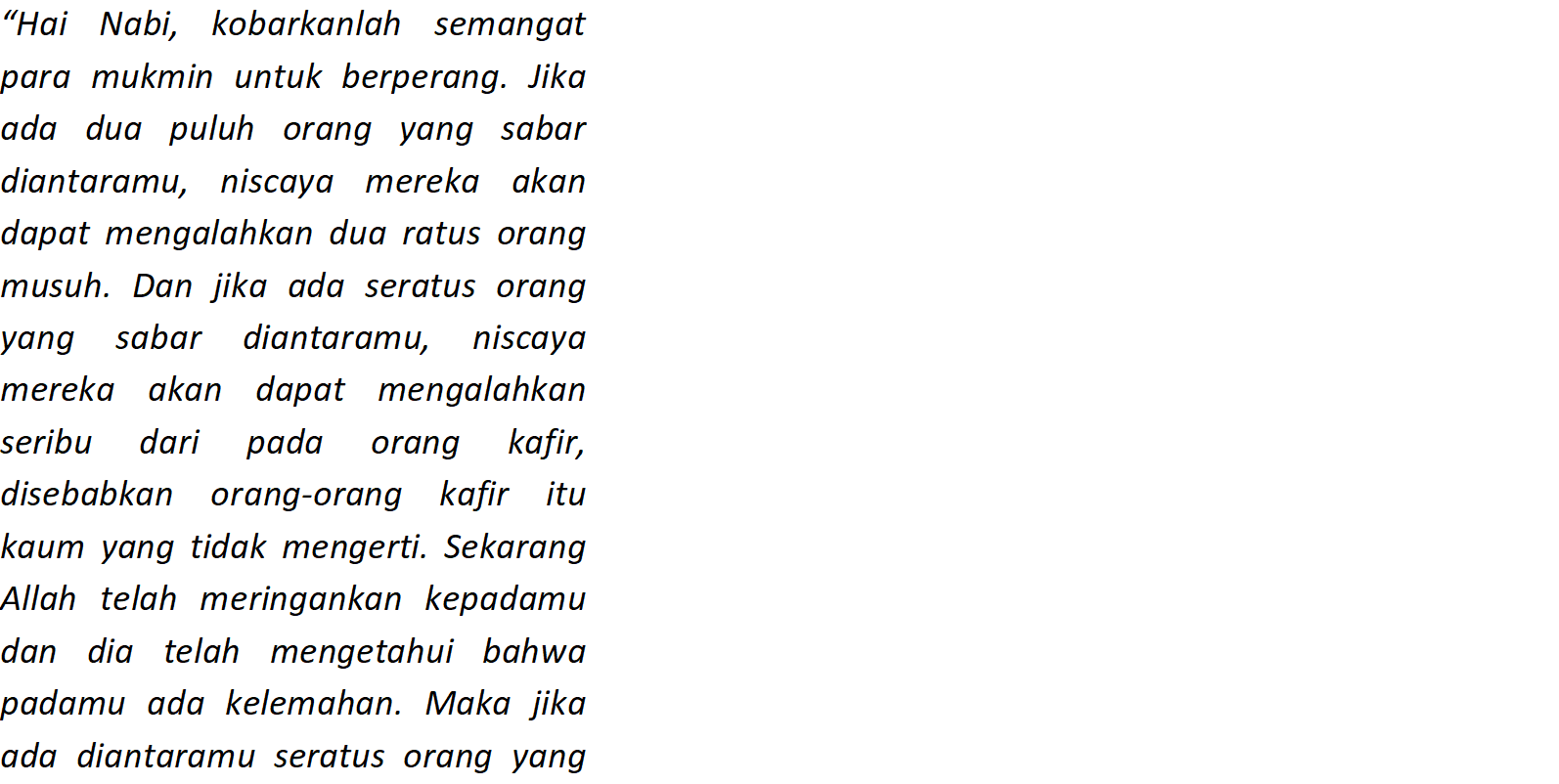
**Faktor-faktor Perubah dan Pembaharuan Hukum**

Perubahan dan pembaharuan hukum tidak serta merta dapat ditarik begitu saja, ada faktor-faktor yang mesti diperhatikan dengan baik dan cermat.

Alquran dan Sunnah sendiri berbicara tentang perubahan hukum itu sendiri. Bila dilihat dalam Alquran, maka disana terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya perubahan hukum dari satu kondisi ke kondisi yang lain.

Dalam surat al-Anfal Allah berfirman: *[[12]](#footnote-12)*





Ketika turun ayat “*jika ada dua puluh orang yang sabar*..” umat Islam ketika itu merasa keberatan ketika mereka diwajibkan untuk tidak lari dari sepuluh orang. Lalu datang keringanan dari Allah pada ayat berikutnya.[[13]](#footnote-13) Di sini menunjukkan adanya perubahan hukum disebabkan terjadi peralihan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan peralihan tersebut diapresiasi oleh Alquran dengan memberikan jawaban solusi yang dapat diterima masyarakat muslim pada waktu itu.

Adapun dari Sunnah dapat dilihat dari hukum menyimpan daging kurban.

Rasulullah saw bersabda, *”Barangsiapa di antara kalian berkurban janganlah ia menyimpannya setelah tiga hari*”. Di tahun berikutnya, para sahabat bertanya, *“wahai Rasulullah apakah kami harus melakukannya seperti yang kami lakukan pada tahun sebelumnya?”* Rasulullah menjawab, *“tidak perlu, karena pada tahun lalu orang-orang sedang dalam krisis. Aku ingin kalian menolongnya”.[[14]](#footnote-14)*

Larangan Nabi menyimpan daging disebabkan adanya kondisi tertentu. Dan ketika kondisi itu hilang maka hukumnya juga hilang. Perubahan hukum di sini terjadi karena adanya perubahan di tengah masyarakat. Hal-hal semacam ini tidak hanya sekali, terdapat banyak kasus.

Ibn Qayyim al-Jauziy, dalam bukunya menulis satu fasal mengenai perubahan fatwa (hukum). Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, tujuan (niat) dan tradisi[[15]](#footnote-15). Ia memberi contoh bahwa Rasulullah saw melarang hukuman potong tangan ketika perang. Karena hal ini akan berdampak kepada hal-hal yang jauh lebih membahayakan lagi. Hal inilah yang membuat para sahabat tidak melakukan *ḥad* atau menangguhkan dalam berbagai peristiwa perang. Di sini terlihat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai ke maslahatan yang lebih besar. Umar bin Khattab sendiri tidak jadi menjatuhkan sanksi potong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya persoalan tersebut, “apakah hukum orang yang mencuri pada masa kelaparan potong tangan?” maka ia menjawab, “tidak, karena kebutuhan (*hâjah*) yang membuatnya seperti itu, dimana orang-orang dalam keadaan lapar dan krisis.[[16]](#footnote-16)

Lebih lengkap, Yusuf al-Qaradhawiy menghimpun faktor-faktor penyebab perubahan hukum. Ada sepuluh faktor yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Perubahan tempat

Hukum dapat berbeda disebabkan perbedaan dan perubahan tempat. Kondisi tempat bersuhu dingin akan berbeda dengan kondisi tempat bersuhu panas. Orang yang tinggal di daerah khatulistiwa dan tropis akan berbeda dengan daerah bersalju seperti di kutub selatan. Keadaan tempat yang berbeda itu dapat menyebabkan perbedaan hukum.

Sebagai contoh, Amr bin Ash pernah junub lalu sholat dengan tayammum tanpa mandi. Hal ini sampai kepada Rasulullah, dan Amr menjawab bahwa malam tersebut sangat dingin, sembari mengutip ayat Alquran[[18]](#footnote-18), “*dan jangalah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”[[19]](#footnote-19)

Contoh lain adalah hukum memelihara anjing. Dalam fikih, umumnya tidak dibenarkan memelihara anjing. Perbedaan tempat bisa saja memberikan pengecualian dari larangan umum tersebut. Seperti memelihara anjing bagi orang Eskimo. Bagi mereka, Anjing adalah kebutuhan primer dalam keseharian disebabkan kondisi tempat bersalju yang mereka diami. Perbedaan tempat ini menyebabkan berbedanya hukum dari keumuman larangan memelihara anjing.[[20]](#footnote-20)

Perubahan tempat memiliki pengaruh terhadap perubahan hukum. Imam Syafi’I, perubahan *qaul qadim* ke *qaul jadid* yang ia lakukan dipengarahi oleh perbedaan kondisi dan tempat antara masyarakat Iraq dan Mesir.[[21]](#footnote-21)

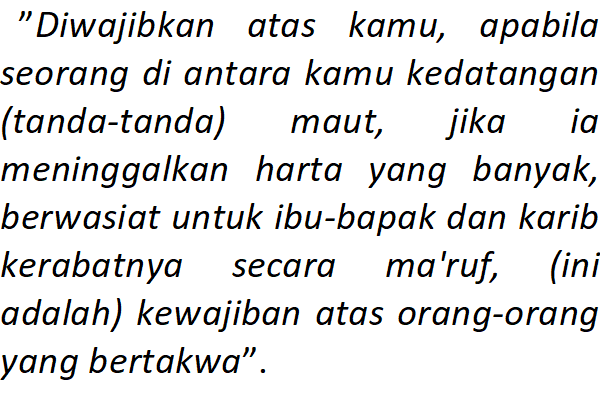
1. Perubahan waktu (zaman)

Perubahan waktu yaitu perubahan tabiat dan watak manusia yang diakibatkan seiring dengan perubahan waktu. Contohnya adalah hukuman bagi peminum khamar. Pada masa Rasulullah, awal hukuman peminum khamar diterapkan dengan cara *ta’zir*. Saksi hukumnya beragam mulai memukul dengan sandal, tangan, dan baju.[[22]](#footnote-22) Hal ini disebabkan karena larangan meminum khamar masih baru diberlakukan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hukuman cambuk mulai diterapkan. Dalam hukumannya, Rasulullah tidak memberikan jumlah batasan tertentu. Terkadang 40 kali cambukan, kurang dari 40, bahkan lebih. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, hukuman diterapkan menjadi 40 kali. Sementara di masa Umar, hukuman diterapkan sebanyak 80 cambukan. Mushtafa az-Zarqa, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawiy menyebutkan bahwa perubahan-perubahan hukum tersubut terjadi dapat diakibatkan oleh kerusakan akhlak masyarakat, hilangnya sifat wara’ dan kelemahan hati. Para ulama menyebutnya dengan kerusakan masa (zaman).[[23]](#footnote-23) Beragamnya sangsi hukum peminum khamar menunjukkan betapa hukum mengalami perubahan. Dan perubahan tersebut tidak terjadi tanpa sebab, melainkan ada faktor-faktor yang membuatnya berubah.

Para ulama Arab Saudi menetapkan, untuk kejahatan perkosaan dengan sangsi hukuman mati. Sedangkan kejahatan perdagangan narkoba, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa hukumnya sama dengan hukuman membegal (*al-harabah*)[[24]](#footnote-24) sebagaimana firman Allah,

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...”[[25]](#footnote-25)*

Disebabkan perubahan waktu, para ahli fikih di beberapa Negara Arab seperti Mesir memberlakukan undang-undang wasiat wajib (*washiyah wajibah*) bagi cucu yatim yang tidak mendapatkan warisan kakeknya karena terhalang oleh paman-paman. Wasiat wajib ini dibuat untuk melindungi cucu tersebut. Karena perubahan waktu, banyak paman-paman saat sekarang ini tidak lagi merasa bertanggungjawab terhadap kehidupan keponakan-keponakannya.[[26]](#footnote-26) Wasiat wajib ini mengambil *istidlâl* dari Alquran, [[27]](#footnote-27)



1. Perubahan Kondisi

Perubahan hukum juga dapat disebabkan karena perubahan kondisi kondisi sakit tidak sama dengan sehat. Kondisi sempit tentu berbeda dengan kondisi lapang, kondisi perang tidak sama dengan aman, kondisi kuat tidak sama dengan lemah. Karena perbedaan kondisi ini, Nabi sendiri pernah mengeluarkan putusan hukum yang berbeda. Misalnya kasus sahabat yang memegang kemaluannya apakah hal tersebut membatalkan wudhu atau tidak. Secara umum Nabi memerintahkan untuk berwudhu bagi orang yang memegang kemaluannya. Namun ada kasus seorang sahabat bertanya kepada nabi bahwa ia memegang kemaluannya dan nabi menjawab bahwa hal itu bagian dari dirimu. Artinya hal tersebut bukan suatu masalah baginya dan tidak perlu berwudhu lagi.

Untuk menjalankan agamanya, kaum muslim membutuhkan kondisi yang representatif untuk menjalankan agama. Hal ini berbeda dengan Kondisi minoritas muslim di masyarakat Eropa atau di Negara mayoritas non-muslim. Dalam kondisi seperti ini, kemudahan (*taisir*) dan keringanan (*takhfif*) sangat dibutuhkan bagi minoritas muslim sehingga mereka bisa hidup dengan agamanya sendiri di tengah komunitas non-muslim.[[28]](#footnote-28)

1. Perubahan Tradisi

Tradisi jual beli dalam fikih klasik misalnya berbeda dengan tradisi perdagangan hari ini. Dalam fikih klasik, jual beli harus *“taqâbudh*” (dari tangan ke tangan). Dalam fikih Syafii ada syarat ijab qabul yang dilafazkan. Di masa sekarang, tradisi-tradisi tersebut tidak sepenuhnya berlaku lagi. Sekarang ini pembayaran dapat dilakukan dengan cara digital, dan menggunakan cek atau membeli tanpa ijab qabul (ambil barang lalu dibayar). Perubahan tradisi tersebut, baik dalam lapangan ekonomi ,sosial dan politik membutuhkan perubahan hukum[[29]](#footnote-29). Contoh lainnya adalah jual beli via internet yang syarat-syarat jual beli fikih klasik terlihat banyak diabaikan. Perubahan hukum dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ijtihad-ijtihad ekonomi MUI ini merupaan pembahuruan yang sejalan dengan denyut perkembangan masyarakat ekonomi kontemporer.[[30]](#footnote-30) Terobosan pemikiran yang terorganisir ini mempertegas bahwa hukum Islam dapat meresap aspirasi masyarakat ekonomi modern tanpa terlepas dari akar dan bingkai keislaman.

Di Indonesia, ada harta gono gini dalam pembagian warisan. Hal ini tidak terdapat dalam literatur-literatur fikih klasik. Perbedaan budaya Indonesia memicu tumbuhnya pemikiran untuk menemukan format pembagian warisan bagi istri atau suami. Adanya harta gono gini merupakan format pembagian warisan masyarakat muslim Indonesia berdasarkan tradisi (‘*urf*)muslim Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa suami dan istri saling membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sama-sama bekerja, sehingga percampuran harta menjadi suatu yang tidak terelakkan. Dengan demikian, ketiak salah satu pasangan wafat maka harta tersebut dibagi antara mereka berdua.[[31]](#footnote-31)

1. Perubahan Pengetahuan

Pengetahuan modern, dengan segala kecanggihan perangkat-perangkat teknologinya berhasil menyuguhkan informasi-informasi yang akurat. Detail-detail kasus lebih mudah diketahui. Hal ini sangat membantu dalam menyelidiki misalnya *illah* (sebab hukum) sebuah hukum. Atau contoh lain adalah tentang kepastian peredaran bulan (ilmu falak), sehingga penentuan hari raya apakah harus memakai kesaksian melihat hilal atau bisa menggunakan teknologi satelit?

Perkembangan pengetahuan modern beserta teknologinya sangat membantu para ulama mengambil keputusan hukum lebih cermat. Dalam bidang makanan dan obat-obatan, pengetahuan modern tidak bisa diabaikan. Penentuan halal dan haram tidak lagi bisa ditentukan dengan melihat jenis makanan dan cara mendapatkannya saja, tapi harus mengetahui proses pembuatan dan zat yang dikandungnya. Keterbatasan informasi akan berpengaruh kepada hasil keputusan yang tepat.

Kehalalan dan keharaman tersebut membutuhkan penelitian terhadap *illah* (sebab) hukum yang ada. Pengetahuan terhadap *illah* suatu kasus benar-benar dapat diuji dan akurat. Misalnya, khamar menjadi haram karena adanya sifat zat yang memabukkan. Namun ketika minuman terbebas dari sifat tersebut dan sifat-sifat merusak lainnya maka menjadi halal.[[32]](#footnote-32) Untuk memastikan ini diperlukan pengetahuan dan teknologi yang memadai.

1. Perubahan kebutuhan manusia

Kebutuhan orang akan berbeda dari satu waktu ke waktu. Kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat modern. Sesuatu yang menjadi *ḥâjiyât* (pelengkap) bagi sekelompok masyarakat dapat menjadi suatu hal yang *dharûrî* (pokok) bagi kelompok laion. Karena itu, dapat dimengerti keputusan fatwa Majelis Fatwa dan Riset Eropa membolehkan minoritas Muslim Eropa membeli rumah dari bank riba. Landasan fatwanya adalah bahwa muslim Eropa memiliki kebutuhan yang sangat besar dan darurat terhadap hal tersebut. Kaidahnya yaitu, “*al-ḥâjah tanzilu manzilah al-dharûrah khaṣṣah kânat au ‘ammah”* (kebutuhan menduduki posisi darurat, baik khusus ataupun umum)[[33]](#footnote-33). Namun perlu diperhatikan, bahwa kebutuhan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu sehingga hukum yang diputuskan tidak sembarangan dan asal-asalan.

1. Perubahan kemampuan manusia

Seiring dengan Perkembangan pengetahuan, kemampuan manusia menjadi lebih meningkat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang dilalui. Kelebihan kemampuan ini dapat mempengaruhi hukum itu sendiri. Misalnya, saat sekarang ini perjalanan dari satu kota ke kota lain dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Hal ini tentu berbeda jika dengan kendaraan kuda atau berjalan kaki yang menyebabkan orang dapat keringanan untuk menjamak sholat. Perubahan kemampuan manusia ini tentu memiliki efek dari hukum rukhsah tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketidakmampuan manusia juga berpengaruh kepada hukum yang dijalankannya. Untuk hal terakhir ini, Islam sudah memiliki konsepnya dalam persoalan *takhfif* dan *rukhshah* (keringan dan kemudahan) [[34]](#footnote-34) dan masuk kedalam satu dari lima besar kaidah fikih, *al-Masyaqqah tajlîb al-Taisîr* (kesusahan mendatangkan kemudahan).

1. Perubahan sosial, dan politik.

Pada masa Umar bin Khattab, penggunaan kata *jizyah* bagi non-muslim tidak lagi dikenakan. Dan dalam masyarakat mayoritas muslim istilah *ahl dzimmah* tidak mendapatkan tempat lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[[35]](#footnote-35) perubahan-perubahan ini disebabkan karena adanya perubahan sosial dan politik dalam masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, mengenai status minoritas, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam terdiri dari empat dimensi; akidah, ibadah, akhlak dan syariah (hukum). Dalam persoalan akidah dan ibadah, Islam tidak berhak memaksa pemeluk agama lain untuk mengikuti kepercayaan dan ibadah tersebut. Dalam sejarah Islam banyak sekali contoh-contoh tersebut. Pemerintahan Islam sejak zaman sahabat memberikan rasa aman kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama mereka. Bahkan Umar bin Khattab ketika menaklukkan baitul maqdis telah membuat perjanjian damai kepada penduduk yang berbeda keyakinan tersebut bahwa mereka memiliki kebebasan dalam menjalankan setiap syiar agama mereka. Bahkan tidak ada kewajiban zakat bagi non muslim. Karena zakat bagian dari ibadah Islam.[[36]](#footnote-36)

Untuk bidang akhlak (etika), sesuatu yang baik; menolong sesama, ramah, sopan dan etika-etika bermasyarakat lainnya tidak ada persoalan bagi setiap pemeluk agama.

Sedangkan dalam masalah syariat (dalam hal ini hukum Islam yang dijalankan dalam pemerintahan Islam), terdapat dua hal menjalaninya. Pertama, hukum yang diperuntukkan semua warga, dan kedua hukum yang terbatas pada sebagian kelompok.

Dalam pernikahan dan warisan, pemerintahan Islam tidak berhak menerapkannya kepada selain muslim. Sebagain mazhab Islam bahkan tidak mewajibkan pemeluk non muslim untuk menjalankan hukum pidana Islam (jinayah) dan hukuman-hukuman bernuansa agama seperti hukum cambuk, potong tangan dan lain sebagainya. Sebagai peggantinya diterapkan hukuman takzir. Hal ini diterapkan dalam sistem hukum pemerintahan Republik Islam Sudan. Demikian pula hal-hal yang menurut Islam haram namun bagi pemeluk lain halal maka syariat Islam tidak perlu diberlakukan, seperti halnya makan babi, anjing dan lain sebagainya. [[37]](#footnote-37)

1. Perubahan pendapat dan pemikiran

Hukum dihasilkan dari proses ijtihad. Dalam berijtihad, para ulama memiliki berbagai metode, pendekatan dan aspek-aspek lainnya. Ada yang bersikap *syadîd* (keras) ada yang *khafif* (ringan). Ada yang bersifat literal dan yang berpandangan maqashid syariah dan illat-illat hukum. Para ulama sendiri banyak mengoreksi kembali pendapatnya setelah berbagai perenungan dan pemikiran yang mendalam dari berbagai sudut. Perpindahan dari satu mazhab ke mazhab lainnya adalah hal yang niscaya dan lumrah.

Dalam perkembagan masyarakat sekarang ini, berpegang pada satu mazhab tertentu memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Persoalan-persoalan yang berkembang membutuhkan banyak pemikiran. Oleh karena itu, kajian-kajian perbandingan, forum-forum yang dihadiri berbagai ulama mazhab dan ahli sangat dibutuhkan. Fatwa-fatwa tidak lagi mesti bersifat individu tapi fatwa jama’i. Sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sektarian melainkan hasil ijtihad banyak orang dan kelompok. Hal inilah yang dilakukan oleh Muktamar Fikih Islam Internasional, Muktamar al-Azhar, dan muktamar-muktamar internaisional yang mengundang berbagai mazhab Islam.

1. Musibah (ujian dan cobaan)

Zaman sekarang, banyak sekali ujian dan cobaan terhadap kaum muslim. Misalnya televisi yang begitu marak menampilkan nyanyian tak layak, bercampurnya laki-laki dan wanita dalam institusi dan pekerjaan, salaman antara laki-laki dan perempuan dan hal-hal lain yang sulit dihindari. Keadaan-keadaan seperti ini menuntut perubahan hukum. Karena musibah dapat menyebabkan keringanan hukum, selama keharamannya tidak *qat’i* apalagi termasuk dosa-dosa besar.[[38]](#footnote-38) Keadaan semacam ini menyulitkan. Idealnya, hal ini tidak terjadi. Namun keadaan sudah demikian. Misalnya di dalam bus, atau angkot yang berdesakan sehingga duduk menjadi berdekatan dan menempel. Dalam keadaan seperti ini, tidaklah bijak jika ada fatwa yang menyatakan haram naik angkot dengan duduk berdekatan dan menempel.

Faktor-faktor perubahan hukum di atas bukanlah sesuatu yang asing dalam penggalian hukum yang dilakukan oleh para mujtahid-mujtahid sejak era klasik. Ijtihad para imam madzhab merupakan upaya untuk menerima sosial budaya yang berlaku di tengah masyarakat menjadi bagian dari fikih..[[39]](#footnote-39)

Dalam sejarah mazhab, dikenal dua corak pemikiran antara *ahl al-ra’y* dan *ahl al-hadits*. Dua corak mazhab ini tidak bisa dilepaskan dari geografis pemikiran ini berkembang. *Ahl ra’y* dengan tokohnya Imam Abu Hanifah berada di kota Baghdad, kota metropolis dengan kompleksitas masyarakat perkotaan dan penduduk yang heterogen. Ditambah Baghdad cukup jauh dari kota-kota hadits seperti Mekah dan Madinah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa corak fikih dalam literatur-literatur mazhab Hanafi banyak bersifat *ra’yu* (akal). Sebaliknya, Imam Malik, tokoh ahl hadits yang hidup di Madinah, kota Nabi saw., tempat lahir dan beredarnya hadits dengan masyarakat sederhana yang akrab dengan tradisi-tradisi kenabian. Maka tidaklah mengherankan bahwa mazhab-mazhab maliki cenderung menggunakan hadits dibanding rasio.[[40]](#footnote-40)

Selain faktor di atas, sarjana Indonesia Abdul Manan menyebutkan bahwa pembaruan dan perubahan hukum Islam dapat terjadi disebabkan:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum yang baru sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid tingkat Nasional dan Internasional.

Perubahan ini sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, bahwa perubahan dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqâṣid* syari’ah dapat merubah hukum itu sendiri. [[41]](#footnote-41)

Perenungan terhadap kondisi dan situasi masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus. Ijtihad adalah proses perenungan mendalam yang bukan saja soal dalil-dalil yang tertulis, melainkan juga tentang persoalan-persoalan dan kondisi yang melingkupi kehidupan masyarakat. Perubahan hukum adalah keniscayaan. Sejarah pemikiran hukum Islam telah mencatat hal-hal tersebut dengan baik.

Perubahan hukum dalam Islam adalah perubahan yang sejalan dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Sosio-kultural masyarakat menjadi tema hangat dalam perubahan hukum tersebut. Oleh sebab itu, tinjauan sosiologis bukanlah sesuatu yang aneh dalam perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Dalam kajian ushul fikih, tinjauan sosiologis ini mendapat tempat pada metode *al-‘urf*.

Mendudukan hukum Islam sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat membutuhkan perangkat-perangkat ilmu yang memadai. Kemampuan memahami disangga oleh kedalaman terhadap ilmu-ilmu Alquran, hadits, sejarah fikih, dan maqashid syariah. Pembaharuan merupakan elaborasi dari berbagai disiplin ilmu dengan realita kekinian. Sehingga perubahan dan pembaharuan hukum Islam sejalan antara nilai-nilai dogmatik agama dan kebernilaiannya di tengah-tengah masyarakat.

**Penutup**

Hukum Islam ada yang bersifat *tsawabit* (tetap) dan ada *mutaghayyirat* (berubah). Nash-nash *zanni* lebih banyak dibandingkan yang *qat’i.*Perubahan hukum Islam bukanlah suatu hal yang keluar dari Islam. Tentunya selama mekanisme *istinbâṭ* hukumnya berjalan sesuai dengan metodologi dan prinsip-prinsip Islam.

Perubahan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat senantiasa dapat ditampung oleh hukum Islam. Karena tujuan dari hukum Islam tak lain untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam perubahan tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi.

**Bibliography**

***Journals***

Saidah, “Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Islam”, *Jurnal hukum diktum*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2016)

Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 16, no. 1 (Mei 2016)

Mudassir, “Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No.2 (2017)

***Books***

Abu Bakar, Al-Yasa’, *Metode Istislahiyah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016)

Abû Dawud, *Sunan Abi Dâwud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418/1997)

Al-Jauzi, Ibn Qayyim*, I’lâm al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamîn* (Arab Saudi: Dâr Ibn al-*Jauziy*, 1423)

Al-Maysawi, Muhammad Ṭâhir, *Maqâṣ*î*d al-Syarî*’*ah al-Islâmiyah*, cet. 2, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 1421/2001)

Al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *al-Maḥṣûl fî ‘ilm al-Uṣûl*, ed. Thaha Jabir, (Beirut: Massisah al-Risalah, t.t)

Al-Sadlân, Ṣâliḥ Ibn Ghanim *al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ*, (Riyadh: Dâr al-Balansiyyah, 1417 H)

Al-Syâṭîbî, *al-Muwâfaqât* (t.tp, tth.)

Al-Thabari, *Taf*s*îr al-Thabarî* (Kairo: Hajr, 1422/2001), 8: 82-83. Lihat juga al-Qurṭubî, *al-Jami’ al-Aḥkâm al-Qur’ân* (Beirut:Muassasah al-Risâlah, 1427/2006)

Al-Qaradhâwî, Yusuf, *Mujîbât Taghayyur al-Fatwâ fî ‘Ashrinâ*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009)

Hamid Hakim, Abdul, *Mabâdi’ al-Awwaliyah*, (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, t.th)

Iyyâdh, Al-Qâdhî, *Syarah Shahih Muslim*, (Manshurah:Dâr al-Wafâ’, 1419/1998)

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (jakarta: Kencana, 2006)

***Theses***

Al-Qaradhâwî, Yusuf*, Nazâriah Maqâṣ*î*d al-Syar*î’*ah* (Tesis:Universitas Kairo, 2000)

1. Muhammad Ṭâhir al-Maysawi, *Maqâṣ*î*d al-Syarî*’*ah al-Islâmiyah*, cet. 2, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 1421/2001), 273-275 [↑](#footnote-ref-1)
2. Al-Syâṭîbî, *al-Muwâfaqât* (t.tp, tth.), 2:331 [↑](#footnote-ref-2)
3. Yusuf al-Qaradhâwî*, Nazâriah Maqâṣ*î*d al-Syar*î’*ah* (Tesis:Universitas Kairo, 2000), 323-324 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., 324 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur al-Fatwâ fî ‘Ashrinâ*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 29 [↑](#footnote-ref-5)
6. Q.S. Al-Anbiya’:107 [↑](#footnote-ref-6)
7. Q.S. Al-Maidah:3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Al-Thabari, *Taf*s*îr al-Thabarî* (Kairo: Hajr, 1422/2001), 8: 82-83. Lihat juga al-Qurṭubî, *al-Jami’ al-Aḥkâm al-Qur’ân* (Beirut:Muassasah al-Risâlah, 1427/2006), 7:293-294 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mudassir, “Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No.2 (2017), 123 [↑](#footnote-ref-9)
10. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,* 28-29 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* 33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Q.S. Al-Anfal:65-66 [↑](#footnote-ref-12)
13. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*33 [↑](#footnote-ref-13)
14. H.R Muslim dalam *al-Adhâhî* hadis ke 1974. Lihat al-Qâdh*î* ‘Iyyâdh, *Syarah Shahih Muslim*, (Manshurah:Dâr al-Wafâ’, 1419/1998), 6:426 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibn Qayyim al-Jauzi*, I’lâm al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamîn* (Arab Saudi: Dâr Ibn al-*Jauziy*, 1423), 4:337 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* 340-342, 350-351 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*53-54 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* 58 [↑](#footnote-ref-18)
19. Q.S. An-Nisa: 9 [↑](#footnote-ref-19)
20. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*59 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,*60 [↑](#footnote-ref-21)
22. Lebih jelasnya lihat H.R Abu Dawud hadis ke 4477. Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418/1997), juz 4, hal. 401-402 [↑](#footnote-ref-22)
23. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*66-69 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,*75-76 [↑](#footnote-ref-24)
25. Q.S. Al-Maidah:33 [↑](#footnote-ref-25)
26. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*66-69 [↑](#footnote-ref-26)
27. Q.S. Al-Baqarah:180 [↑](#footnote-ref-27)
28. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,* 83 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,*91 [↑](#footnote-ref-29)
30. Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 16, no. 1 (Mei 2016), 216 [↑](#footnote-ref-30)
31. Al-Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiyah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 197-199 [↑](#footnote-ref-31)
32. Fakhr al-Dîn Al-Râzî, *al-Maḥṣûl fî ‘ilm al-Uṣûl*, ed. Thaha Jabir, (Beirut: Massisah al-Risalah, t.t), 5:208 [↑](#footnote-ref-32)
33. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*108 [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdul Hamid Hakim, *Mabâdi’ al-Awwaliyah*, (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, t.th), 29-30; Ṣâliḥ Ibn Ghanim al-Sadlân, *al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ*, (Riyadh: Dâr al-Balansiyyah, 1417 H), 228-235. [↑](#footnote-ref-34)
35. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*114 [↑](#footnote-ref-35)
36. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Khiṭâbunâ al-Islamiy fî ‘Ashr al-‘Aulamah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004), 187 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.*, 188-189 [↑](#footnote-ref-37)
38. Yûsuf al-Qaradhâwî, *Mujîbât Taghayyur…,*125-127 [↑](#footnote-ref-38)
39. Al-Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiyah,* 191 [↑](#footnote-ref-39)
40. Saidah, “Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Islam”, *Jurnal hukum diktum*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2016), 216 [↑](#footnote-ref-40)
41. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (jakarta: Kencana, 2006), h. 226-227 [↑](#footnote-ref-41)